



SIARAN PERS

Permohonan Pembatasan Jabatan Presiden Diperbaiki

Jakarta, 1 Februari 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (01/02), pukul 10.00 WIB. Perkara dengan nomor 4/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh Herifuddin Daulay.

Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan telah diberlakukannya norma Pasal a *quo* tentang adanya pembatasan pribadi jabatan Presiden hanya boleh mendaftar dan atau terpilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Kerugian tersebut berdasarkan anggapan Pemohon bahwa orang yang kompeten untuk jabatan Presiden hanya sedikit, sehingga pembatasan tersebut akan mengakibatkan pemimpin yang terpilih adalah orang yang tidak berkompoten.

Selanjutnya Pemohon menilai, terdapat kesalahan dalam teks Pasal 7 UUD 1945 tentang jabatan Presiden, baik kesalahan karena penulisan teks atau kesalahan dalam memahami teks. Kesalahan secara implisit mengandung makna “bila” yaitu terkandung makna “Kondisional bersyarat”. Kesalahan tersebut adalah karena teks tersebut mengambang dalam pengertiannya. Dengan makna “kondisional bersyarat” tersebut maka diperlukan peraturan tambahan untuk menguatkan maksud dari norma dimaksud, sehingga secara keseluruhan makna utuh dari Pasal 7 UUD 1945 adalah hanya diutamakan untuk ditetapkan 2 (dua) kali masa periode dan jika diinginkan, melalui pembiaran atau keputusan peradilan konstitusi yaitu oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun peraturan tambahan berupa Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i pada UU Pemilu menurut Pemohon menjadi pokok dasar dari adanya pembatasan pribadi jabatan calon Presiden dan atau Wakil Presiden untuk menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun berselang. Sehingga, Pemohon berpendapat bahwa pembatasan jabatan Presiden justru lebih besar mudharat ketimbang manfaatnya sehingga norma yang mengatur pembatasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 2 (dua) kali masa jabatan harus dihapus.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah mengabulkan permohonan untuk menyatakan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon, Dalam sidang Kamis (19/1), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan pemohon untuk melihat permohonan-permohonan yang telah dikabulkan oleh MK. Selain itu, Wahiduddin juga meminta Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan. “Setelah diuraikan aturan-aturannya dan saudara menjelaskan kerugian konstitusi yang

dialami saudara. Di alasan permohonan terlalu banyak karena menyebutkan satu persatu. Terlebih lagi pada alasan permohonan itu saudara seolah-olah tidak menguji UU tetapi UUD ini. Justru yang saudara harus kemukakan itu dasar pengujiannya pasal mana dipertentangkan dengan pasal UUD 1945,” kata Wahiduddin saat memberikan saran perbaikan.

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan pemohon untuk menguraikan kedudukan hukumnya. “Kaitannya dengan bapak sebagai perorangan warga negara pembayar pajak mempunyai hak pilih berargumentasi mempunyai kerugian konstitusional terhadap syarat yang ada di Pasal 7 di mana, itu yang harus dijelaskan,” terang Suhartoyo. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)